

**IMPLEMENTASI PROGRAM SI PERLU (SISTEM INFORMASI PRESENSI  
PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG) DALAM MENINGKATKAN  
KEDISIPLINAN PEGAWAI  
(Studi Kebijakan Pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang)**

***Abdul Haris Nur Sugeng<sup>1</sup>, Slamet Muchsin<sup>2</sup>, Hayat<sup>3</sup>***

*Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,  
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia*

*E-mail: [abdulharisns17@gmail.com](mailto:abdulharisns17@gmail.com)*

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) untuk mengetahui implementasi program SI PERLU dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. 2) untuk mengetahui bagaimana peran program SI PERLU dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang 3) untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi program SI PERLU dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan naturalistik. Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa atau fenomena yang ada di lapangan dengan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Implementasi program SIPERLU di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang berjalan dengan baik sesuai dengan ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan, komunikasi antar anggota dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. 2) Peran dan Implikasi SIPERLU dalam meningkatkan Kedisiplinan pegawai terbukti dari tingkat kehadiran pegawai sesuai dengan wawancara dari narasumber yang mulai disiplin tepat waktu. 3) Faktor pendukung Implementasi program SIPERLU dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai adalah Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Faktor penghambat Implementasi program SIPERLU dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai adalah masih kurangnya kesadaran pegawai terhadap program SIPERLU dan masih terbatasnya jaringan.*

**Kata kunci:** Implementasi, Kedisiplinan pegawai, SI PERLU

**Pendahuluan**

Teknologi yang paling berkembang adalah teknologi yang berbasis website atau yang akrab disebut dengan internet. Kehadiran teknologi internet di tengah masyarakat mampu memenuhi kebutuhan akan informasi dengan sangat cepat, tepat, dan akurat. Banyak instansi pemerintah yang sudah memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pelayanan publik. Dengan diterbitkannya peraturan presiden no 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau e-government, E-government merupakan penggunaan teknologi informasi dalam keberlangsungan kerja pemerintah dengan pihak-pihak terkait. (Modern Sindonews, 2018)

Pergeseran Teknologi Informasi sekarang sudah menjangkau ke semua bidang, kebutuhan informasi yang akurat, tepat dan cepat dalam menyajikan data yang sangat lengkap merupakan salah satu tujuan penting. Smartphone berperan aktif dalam segala bidang dan akan mempermudah pekerjaan manusia. Pemanfaatan teknologi

smartphone yang kemudian sangat pesat perkembangannya. Keunggulan dari smartphone dengan sistem operasi android memungkinkan pengguna memasang banyak aplikasi yang menunjang pekerjaan keseharian mereka. Hal ini yang menyebabkan smartphone di Indonesia mencapai sekitar 55 juta pengguna yang menempatkan Indonesia sebagai pengguna ketiga terbanyak setelah China dan India dalam akupan Asia-Pasifik (Jose, 2015).

SIPERLU hadir guna menjawab tantangan Pemerintah Republik Indonesia untuk memaksimalkan penggunaan e-Government dalam setiap kinerjanya. Kinerja pemerintah didefinisikan sebagai hasil dari kegiatan dan program pemerintah yang hendak atau telah di capai sehubungan dengan penggunaan2 anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur (PP Nomor 8 Tahun 2006) Disamping penilaian terhadap kinerja, pemerintah juga harus mempertanggung jawabkan kinerja yang telah di capainya. (Surabaya Tribunnews, 2019)

Salah satu fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Aparatur Sipil Negara (ASN) menjalankan program SIPERLU yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Lumajang. Untuk mendalami permasalahan SIPERLU peneliti melakukan Preliminary pada tanggal 15-18 Februari 2021. Studi awal dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah kabupaten Lumajang. Observasi dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan program SIPERLU di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.

Dengan menggunakan SIPERLU, presensi ASN akan terekam secara online dan sistematis menggunakan perangkat android yang dimiliki masing-masing ASN sebagai medianya sehingga kehadiran ASN tidak bisa dimanipulasi. Dengan demikian tindak kecurangan dalam hal kehadiran ASN dapat diminimalisir. Namun realitanya SIPERLU mencatat terjadi 21 pelanggaran oleh ASN Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang dalam rentang tanggal 2 Januari hingga 18 Februari 2021. Jenis pelanggaran diantaranya, satu perangkat dipergunakan untuk lebih dari satu orang, saat presensi berada di luar titik koordinat, keterlambatan absensi masuk, keterlambatan absensi pulang, pelanggaran tersebut dapat terdeteksi oleh SIPERLU.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian di Badan Kepegawaian Daerah kabupaten Lumajang sangat menarik untuk diteliti dengan judul "Implementasi Program SI PERLU (Sistem Informasi Presensi Pemerintah Kabupaten Lumajang) dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang".

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi program SI PERLU dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang?
2. Bagaimana peran dan implikasi program SI PERLU dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang?
3. Apa saja faktor penghambat dan pendukung pengimplementasian program SI PERLU dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang?

### **Tinjauan Pustaka**

#### **Penelitian Terdahulu**

1. Penelitian yang pertama, yaitu dilakukan oleh Abas Sunarya (2019) yang berjudul "Aplikasi Mobile Absensi Karyawan dan Pengajuan Cuti Berbasis GPS".

2. Penelitian yang kedua, yaitu dilakukan oleh Ahmad Ari Gunawan Sepriansyah (2019) yang berjudul "Implementasi Geotagging Pada Aplikasi Absensi Karyawan Berbasis Android Webservice".
3. Penelitian yang ketiga, yaitu dilakukan oleh Yani Mulyani (2020) yang berjudul "Penerapan Absensi Online Berbasis Android Pada Peningkatan Kedisiplinan dan Kinerja Guru Pegawai Negeri Sipil Pada Bidang PAI".
4. Penelitian yang keempat, yaitu dilakukan oleh Nurul Fardiana (2019) yang berjudul "Penerapan Absensi Online (JATHILAN) Bagi Penilik Sekolah Ponorogo".
5. Penelitian yang kelima, yaitu dilakukan oleh Al Husain, Aji, Andre (2017) yang berjudul "Perancangan Sistem Absensi Online Menggunakan Android Guna Mempercepat Proses Kehadiran Karyawan pada PT.Sintech Berkah Abadi".

#### **Pengertian kebijakan publik**

Menurut Hayat (2018: 13), kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk kepentingan bersama. Setiap kebijakan publik pasti mempunyai proses evaluasi dan formulasi yang mengikutinya. Semua proses kebijakan publik saling mempengaruhi satu sama lainnya, tidak bisa saling melemahkan, tetapi sebaliknya harus saling menguatkan, sehingga kebijakan berjalan secara baik dan optimal.

#### **Pengetian implementasi kebijakan**

Secara umum implementasi diartikan sebagai penerapan atau pelaksana rencana yang telah disusun cermat atau matang. Menurut Pressman dan Widavsky dalam Wahab (2004:65) implementasi biasanya berkaitan dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh suatu badan atau lembaga guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Agustino (2010:139) berpendapat bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

#### **Model implementasi kebijakan**

Keberhasilan implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh beberapa variabel atau faktor-faktor tertentu yang mana saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Seperti yang dikemukakan Edward III. George C. Edwards III (1980) dalam Subarsono (2015:90) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor atau variabel yakni:

1. Komunikasi, yaitu dimana keberhasilan implementasi kebijakan mengharuskan agar implementator mengetahui apa yang harus

dilakukan. Implementator harus mengetahui apa tujuan dan sasaran kebijakan kemudian di transmisikan atau diteruskan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi penyimpangan dalam implementasi.

2. Sumberdaya, dalam implementasi kebijakan diperlukannya sumberdaya yang memadai sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif.
3. Disposisi, merupakan watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, ataupun sifat demokratis.
4. Struktur Birokrasi, struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan

Menurut Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2013:99) ada indikator-indikator dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Ukuran tujuan kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik agen pelaksana
4. Sikap atau kecenderungan (Disposisi) para pelaksana
5. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana
6. Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

### **Pengertian disiplin kerja**

Menurut Wirjo Surachmad dalam buku Wawasan Kerja Aparatur Negara, menjelaskan pengertian disiplin adalah: “sikap mental yang tercermin dalam perbuatan, tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah atau etik, norma serta kaidah yang berlaku dalam masyarakat” (Wirjo Surachmad, 1993).

### **Program SI PERLU**

SI PERLU (Sistem Informasi Presensi Pemerintah Kabupaten Lumajang) merupakan bagian dari aplikasi SiMAK (Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian) yang dikhususkan pada penanganan administrasi presensi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang. Dengan menggunakan SI PERLU, presensi ASN akan terekam secara online dan sistematis menggunakan perangkat android yang dimiliki masing-masing ASN sebagai medianya.

### **Metode Penelitian**

#### **Jenis dan Pendekatan penelitian**

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar

yang berkonteks khusus. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dimana data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

### **Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

1. Implementasi Program SIPERLU dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang ?
2. Peran dan implikasi program SI PERLU dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang ?
3. Faktor - faktor yang mempengaruhi Implementasi program SIPERLU dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang ?

### **Situs dan Latar Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian terhadap objek yang akan diteliti. Didalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. Sedangkan situs penelitian adalah suatu tempat dimana peneliti dapat memperoleh data maupun informasi yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang ditemukan dalam bab terdahulu, maka situs dari penelitian ini adalah Program SIPERLU di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.

### **Sumber Data**

Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder :

1. Data Primer  
Yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
2. Data Sekunder  
Yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situ di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pada dasarnya ada tiga teknik pengumpulan data yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif yang berupa tulisan-tulisan dalam bentuk kumpulan kata, tidak berupa angka dan telah dikumpulkan dengan berbagai macam cara diantaranya, wawancara, observasi, dokumentasi, maupun dalam bentuk rekaman audio dan video. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data adalah Pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

### **Keabsahan Data**

Sugiyono (2008:270) mengemukakan, keabsahan data bagian yang sangat penting dimana digunakan untuk meyakinkan peneliti bahwasannya data yang telah didapatkan oleh peneliti itu benar adanya juga dapat di percaya. Untuk mengetahui keabsahan data peneliti menggunakan teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, trigulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis negatif, membercheck

### **Pembahasan**

#### **Penyajian Data**

##### **Deskripsi lokasi penelitian**

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kantor pemerintahan kabupaten Lumajang yang beralamat di Jalan. Ahmad Yani No. 52 Kepuharjo, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang, Jawa timur. Badan Kepegawaian Kabupaten Lumajang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah. BKD bertanggung jawab kepada Bupati Lumajang melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sumber daya merupakan salah satu penunjang keberhasilan organisasi dalam melaksanakan tugasnya. BKD Kabupaten Lumajang memiliki pegawai sebanyak 48 orang.

##### **Implementasi program SI PERLU dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai**

Program SIPERLU merupakan program kerjasama antara Badan Kepegawaian Daerah dengan Bupati Lumajang melalui Sekretariat kabupaten lumajang sebagai program yang akan mengantisipasi kecurangan pada sistem absensi manual sebelum diterapkannya SI PERLU. Selain itu dengan sistem yang terintegrasi dengan sistem manajemen daerah yang disebut SiMAK secara tidak langsung meminta pegawai meningkatkan

kinerjanya dengan melakukan pelaporan pekerjaan setiap hari kerja.

Kedua sistem itu bekerja secara berkesinambungan yaitu dimana setelah setiap pegawai melakukan absensi mereka secara otomatis, sehingga mereka harus melakukan pekerjaan setiap harinya. Melalui kedua aplikasi yang saling berkaitan ini setiap pegawai yang kurang disiplin dan setiap pegawai yang disiplin akan tercatat secara detail.

##### **a. Ukuran dan tujuan kebijakan**

Dari hasil penelitian diketahui bahwa peningkatan kedisiplinan aparatur sipil negara merupakan salah satu tujuan dasar dari penerapan sistem absensi online berbasis android SIPERLU di lingkungan pemerintahan. Hal ini dikarenakan banyaknya kecurangan-kecurangan yang sering dilakukan pegawai pada absensi manual terdahulu. Selain meningkatkan kedisiplinan, data dari sistem absensi online berbasis android SIPERLU juga digunakan sebagai acuan untuk melakukan perhitungan TPP atau Tambahan Penghasilan Pegawai yang secara umum disebut dengan tunjangan pegawai.

##### **b. Sumber daya**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa sumberdaya manusia terhadap implementasi kebijakan sistem absensi SIPERLU sudah mendukung, beberapa pegawai sudah menunjukkan sikap yang disiplin dan taat peraturan. Namun berdasarkan pengamatan penulis, beberapa pegawai masih juga melakukan perilaku yang kurang disiplin seperti terlambat entah itu sengaja maupun tidak sengaja, juga tidak ada dikantor pada saat jam kerja tanpa keterangan apapun. Hal ini sudah dianggap maklum bagi sesama pegawai dikantor. Selain itu, penggunaan sistem absensi SIPERLU dalam kaitannya dengan perhitungan TPP membuat pegawai diwajibkan mendukung berjalannya sistem ini dikarenakan adanya pengaruh dari kehadiran mereka terhadap TPP/tambahan penghasilan mereka.

##### **c. Karakteristik agen pelaksana**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui, bahwa peraturan penggunaan sistem absensi elektronik SIPERLU di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang yang menggantikan sistem absensi manual sudah sesuai dan menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah kehadiran pegawai. Adapun pemerintah dengan tepat sudah mengambil langkah untuk mengurangi kesempatan pegawai pemerintahan melakukan tindakan

yang tidak disiplin dengan menjalankan sebuah aplikasi pengukur prestasi kinerja.

d. Sikap dan kecenderungan (Disposisi)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan absensi SIPERLU di kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang sudah didukung oleh para Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada kantor dinas tersebut walaupun masih ada beberapa pegawai yang terlihat bersungut-sungut dalam melaksanakannya. Selain itu dengan adanya hak yang diterima seperti TPP/tambahan penghasilan pegawai yang akan diberikan berdasarkan dengan kedisiplinan serta prestasi kerja membuat pegawai semakin mendukung berjalannya sistem absensi SIPERLU ini. Pemerintah berusaha memberikan peningkatan kesejahteraan kepada setiap aparatur sipil negara melalui peraturan-peraturan yang dengan jelas juga membuat pegawai harus meningkatkan kualitas mereka. Sejalan dengan meningkatnya kinerja pegawai maka bertambah pula pemasukan tambahan bagi pegawai sebagai penunjang peningkatan kesejahteraan mereka.

e. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mendukung efisiensi penggunaan sistem absensi SIPERLU adalah dengan melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah. Badan Kepegawaian Daerah sesuai pasal 34 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian bahwa untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah yang merupakan perangkat daerah (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999).

f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa implementasi sistem absensi SIPERLU memang membuat suasana kantor menjadi lebih ramai. Beberapa pegawai terlihat lebih sibuk serta pegawai yang membutuhkan keperluan dengan pegawai lainnya dapat langsung bertemu dalam kantor tanpa harus mencari-cari dan melakukan panggilan sebagainya. Selain itu memang masih ditemui beberapa pegawai yang pergi ke kedai kopi bersama dengan pegawai yang lain untuk meminim kopi dan sebagainya diluar jam istirahat.

Hasil penelitian dan pengamatan menunjukkan bahwa lingkungan ekonomi dan sosial dapat mempengaruhi berjalannya implementasi sistem absensi SIPERLU, adapun pengaruh lingkungan sosial yang dapat dijumpai adalah semakin ramainya aktivitas pegawai kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang, selain itu pengaruh lingkungan ekonomi juga dapat dilihat melalui meningkatnya kehadiran dan kinerja pegawai untuk mendapatkan prestasi kerja yang baik yang nantinya akan berpengaruh terhadap pemberian tunjangan atau penghasilan tambahan mereka.

### **Peran dan Implikasi SI PERLU dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai**

Program absensi berbasis android SIPERLU sudah dilaksanakan hampir 3 tahun lamanya. Dengan waktu yang terbilang cukup singkat tersebut sangat membawa keterlibatan bagi kedisiplinan pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. Terbukti dengan terlihatnya jumlah pelanggaran setiap waktunya yang bisa dilihat hanya dengan satu genggam tangan yaitu smartphone.

### **Faktor pendukung dan penghambat program SI PERLU**

- a. Faktor Pendukung Implementasi Program SIPERLU
  - Komunikasi
  - Sumber daya
  - Disposisi
  - Struktur birokrasi
- b. Faktor Penghambat Implementasi Program SI PERLU
  - Kurangnya kesadaran pegawai.
  - Masih terbatasnya jaringan.

### **Pembahasan**

#### **1. Implementasi program SI PERLU dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai**

Dalam pelaksanaan sehari-hari, SIPERLU sangat berjasa bagi perkembangan teknologi di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang. Tidak hanya untuk mendisiplinkan pegawai tapi perlahan SIPERLU merubah tatanan teknologi seiring berkembangnya zaman. Sedikit demi sedikit pegawai mulai merasakan dampak penerapan SIPERLU ini. SIPERLU sangat mudah diaplikasikan pada Handphone android.

#### **2. Peran dan implikasi SI PERLU dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai**

Setiap program atau kebijakan yang diterapkan pastilah membawa pengaruh

terhadap individu pegawai. Pengaruh tersebut bisa berupa pengaruh positif atau bahkan negative tergantung bagaimana program tersebut dilaksanakan. Pada program SIPERLU pun memiliki harapan dan tujuan positif yakni mengurangi angka Indisipliner yang ada di Pemerintahan Kabupaten Lumajang termasuk pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang.

Dalam pelaksanaan absensi SIPERLU yang ada di kantor BKD Kabupaten Lumajang menunjukkan komponen-komponen absensi yang memiliki pengaruh yang signifikan dengan kedisiplinan pegawai adalah mengisi absen, penerapan absen, sarana penunjang, kesesuaian absen dengan pekerjaan dan sikap. Absen merupakan suatu hal penting dalam dunia kerja.

### **3. Faktor pendukung dan penghambat program SI PERLU dalam meningkatkan kedisiplinan pegawai.**

#### **a. Faktor Pendukung Implementasi program SI PERLU**

##### **1. Komunikasi**

Para pegawai akan terbangun komunikasinya apabila salah satu dari sistem SIPERLU mereka tidak bisa terconnect atau terhubung dengan internet. Dengan adanya saling komunikasi diharapkan para pegawai masih memegang teguh sebagai makhluk sosial.

##### **2. Sumber Daya**

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sumber daya merupakan faktor yang sangat penting. Sumber daya disini tidak hanya berupa sumber daya manusia tapi juga sumber daya lain yang juga menunjang pelaksanaan program SIPERLU. Dalam proses implementasi program SIPERLU, implementator memanfaatkan sumberdaya dengan baik dibuktikan dengan para kepala masing-masing bidang yang menjalankan tugas sesuai dengan wewenang, bekerjasama dan berjalan secara beriringan sesuai dengan tugas masing-masing.

##### **3. Disposisi**

Berdasarkan dengan penelitian, disposisi para implementator dilakukan dengan cukup baik melihat komitmen implementator dalam menjalankan program.

##### **4. Struktur Birokrasi**

Dari hasil penelitian yang dilakukan sudah ada SOP tertulis berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 tahun

2018 yang berisi tentang terobosan presensi online yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

#### **b. Faktor Penghambat Implementasi program SIPERLU**

##### **1. Kurangnya kesadaran pegawai**

Berdasarkan apa yang peneliti temukan, kesadaran akan individu sebagai pegawai yang mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan ternyata masih belum sepenuhnya terlaksana. Masih saja beberapa pegawai yang menganggap remeh tentang SIPERLU ini. Dalam pengaplikasiannya SIPERLU bisa dikatakan tidak optimal apabila masih ada pegawai yang kurang mempunyai kesadaran dalam diri sendiri.

##### **2. Masih terbatasnya jaringan**

Salah satu titik lemah dari program yang bersifat online dan membutuhkan signal yang cukup, maka program SIPERLU sudah bisa dikatakan program yang bergantung pada kekuatan signal dan internet. Internet tidak akan bisa terakses tanpa ada bantuan dorongan dari listrik.

## **Kesimpulan**

Tujuan dari implementasi program kebijakan absensi SIPERLU adalah untuk mengawasi dan meningkatkan disiplin kehadiran serta kinerja aparatur sipil negara. Adapun dilihat dari ukuran kebijakan yaitu setiap aparatur sipil negara telah mencerminkan diri memenuhi disiplin kehadiran dengan datang lebih awal dan pulang sesuai waktunya. Aparatur sipil negara juga memenuhi kebijakan e-performance atau aplikasi kinerja dimana setiap aparatur sipil negara pada kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang diwajibkan melakukan kehadiran dan kemudian bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan diberlakukannya absensi SIPERLU, kedisiplinan karyawan dalam bekerja mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini terbukti dengan adanya karyawan yang memiliki etos kerja yang tinggi sehingga memiliki semangat dalam menaati peraturan yang telah ditetapkan. Namun, masih terdapat karyawan yang kurang disiplin. Hal ini disebabkan masih rendahnya etos kerja karyawan dan ada faktor lainnya.

## **Saran**

Sebagai salah satu bentuk dari tanggung jawab terhadap pengembangan terhadap kelangsungan Program SIPERLU pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lumajang sudah seharusnya dilakukan seoptimal mungkin. Berikut saran yang dapat diberikan:

- a. Menyusun strategi baru dalam pelaksanaan program SIPERLU agar bisa terus berkembang dari hari kehari.
- b. Memanfaatkan para pegawai yang mempunyai bakat dibidang teknologi agar memiliki kesempatan untuk mengembangkan progra SIPERLU tersebut.
- c. Merangkul lebih banyak pegawai yang memiliki kompetensi dalam bidan santek agar nantinya program SIPERLU dapat berkembang secara pesat dan dapat ditiru oleh berbagai pihak.

### **Daftar Pustaka**

- Agustino, Leo. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ekowati. 2005. *Perencanaan, Implementasi & Evaluasi Kebijakan*. Surakarta: Pustaka Citra.
- Jose. 2015. *Perkembangan Pengguna Teknologi Smartphone*. Jakarta: Mandiri.
- Hasibuan, Malayu. 2008. *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi, Formulasi*. Malang: Intrans Publishing.
- Livine. 1980. *Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja*: terj. Iral Soedjono. Jakarta: Cemerlang.
- Moloeng, Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nitisemito, Alex S. 1980. *Managemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Sassmito Bross.
- Sadhana. 2010. *Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Malang: CV. Citrab
- Sinambela, Lijan Poltak. 2008. *Reformasi Pelayanan Publi: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.